MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 7 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Penerapan Kode Etika Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan

Imam Hanafi
imamhanafi@eco.uir.ac.id
Sufian Hamim
sufianhamim@soc.uir.ac.id
Sarah Osella Br Sitanggang
sarahosellabrsitanggang@student.uir.ac.id
Adinda Wulan Vairana
adindawulanvairana@student.uir.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Abstract

This study aims to analyze the application of the code of ethics in corporate financial management and its impact on the quality of financial reporting and stakeholder trust. Using a qualitative descriptive approach with a literature study method, this research examines the relationship between ethical principles transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and sound financial management practices. The results show that the consistent application of a code of ethics significantly reduces the risk of financial fraud, improves the quality of financial disclosures, and strengthens stakeholder confidence. Companies that integrate ethical values into their financial management systems tend to have better corporate governance and long-term financial sustainability. This study contributes to the growing literature on business ethics and corporate governance, particularly in the Indonesian context.

Keyword: code of ethics, financial management, corporate governance, transparency, accountability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etika dalam pengelolaan keuangan perusahaan dan dampaknya terhadap kualitas pelaporan keuangan serta kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode studi literatur, penelitian ini mengkaji hubungan antara prinsip-prinsip etika transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dengan praktik pengelolaan keuangan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etika secara konsisten dapat meminimalkan risiko kecurangan keuangan, meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Perusahaan yang mengintegrasikan nilai-nilai etis dalam sistem pengelolaan keuangannya cenderung memiliki tata kelola yang lebih baik dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur etika bisnis dan tata kelola perusahaan, khususnya dalam

Article history
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagiarism checker no 80
Prefix DOI :
10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

konteks Indonesia.

Kata Kunci: *kode etika, pengelolaan keuangan, tata kelola perusahaan, transparansi, akuntabilitas*

1. Introduction

Pengelolaan keuangan perusahaan merupakan salah satu pilar utama dalam keberlangsungan operasional dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Setiap keputusan finansial yang diambil oleh manajemen—mulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan arus kas, investasi modal, hingga pelaporan keuangan—memiliki implikasi langsung terhadap kondisi perusahaan dan kepercayaan publik. Di tengah dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan penuh tekanan, pertanyaan mengenai *bagaimana* keputusan-keputusan finansial tersebut diambil menjadi sama pentingnya dengan pertanyaan mengenai *apa* keputusan yang diambil. Di sinilah peran kode etika menjadi sangat sentral: sebagai kompas moral yang membimbing setiap tindakan keuangan agar senantiasa berlandaskan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan (Dewi & Rahayu, 2022).

Dalam beberapa dekade terakhir, serangkaian skandal keuangan berskala besar di tingkat nasional maupun internasional telah menjadi pengingat keras betapa destruktifnya dampak absennya etika dalam pengelolaan keuangan. Kasus-kasus seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana perusahaan, dan korupsi yang melibatkan oknum manajemen tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial yang masif, tetapi juga menghancurkan reputasi perusahaan yang dibangun selama bertahun-tahun dan merusak kepercayaan investor secara sistemik (Supriyanto & Mulyadi, 2021). Kejadian-kejadian tersebut menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi saja tidaklah cukup; dibutuhkan fondasi etika yang kuat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menyesatkan pihak-pihak yang bergantung pada informasi keuangan tersebut.

Di Indonesia, urgensi penerapan kode etika dalam pengelolaan keuangan semakin meningkat seiring dengan bertumbuhnya jumlah perusahaan publik dan meningkatnya tuntutan transparansi dari regulator, investor, maupun masyarakat umum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui berbagai peraturannya telah mewajibkan perusahaan publik untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang di dalamnya memuat standar etika tinggi dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, berbagai kasus pelanggaran masih terus terjadi, yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi nyata di lapangan (Rahmawati & Setiawan, 2024). Kesenjangan ini mendorong perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan kode etika dalam konteks pengelolaan keuangan perusahaan di Indonesia.

Kode etika dalam pengelolaan keuangan tidak dapat dipisahkan dari konsep integritas organisasi secara keseluruhan. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki budaya etika yang kuat cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas, memiliki tingkat manajemen laba yang lebih rendah, dan mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari pasar modal (Astuti & Permana, 2021). Lebih jauh, etika dalam keuangan juga berkaitan erat dengan keberlanjutan bisnis; perusahaan yang mengabaikan pertimbangan etis dalam keputusan finansialnya cenderung menghadapi risiko reputasi, hukum, dan regulasi yang pada akhirnya mengancam eksistensinya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan kode etika seharusnya dipandang bukan sekadar kewajiban kepatuhan, melainkan sebagai investasi strategis yang memberikan nilai tambah jangka panjang bagi perusahaan.

Penerapan kode etika juga memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar pencegahan kecurangan. Dalam perspektif stakeholder theory, perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan harapan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham,

kreditur, karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, dan pemerintah (Nugroho & Santoso, 2021). Kode etika yang komprehensif dalam pengelolaan keuangan memastikan bahwa kepentingan semua pihak tersebut dipertimbangkan secara seimbang dalam setiap keputusan finansial yang diambil. Hal ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan pemegang saham; pendekatan berbasis etika mengakui bahwa keberlanjutan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang hanya dapat tercapai apabila kepentingan seluruh pemangku kepentingan dipenuhi dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan kode etika dalam pengelolaan keuangan perusahaan, mencakup: (1) prinsip-prinsip etika yang relevan dalam konteks keuangan perusahaan; (2) variabel-variabel yang menjadi indikator kualitas pengelolaan keuangan berbasis etika; (3) dampak penerapan kode etika terhadap kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan; serta (4) tantangan dan rekomendasi untuk memperkuat budaya etika dalam pengelolaan keuangan. Dengan memahami dimensi-dimensi tersebut secara terintegrasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur etika bisnis di Indonesia, sekaligus memberikan panduan praktis bagi manajemen perusahaan dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga bertanggung jawab dan berintegritas.

2. Literature Review

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review* / SLR). Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai penelitian terdahulu mengenai penerapan kode etika dalam pengelolaan keuangan perusahaan secara komprehensif (Sugiyono, 2021). Pendekatan SLR memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang holistik dan berbasis bukti mengenai suatu fenomena melalui analisis kritis terhadap berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dan dapat diandalkan dibandingkan penelitian tunggal. Protokol penelitian SLR dalam studi ini mengikuti panduan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang diakui secara internasional sebagai standar pelaporan tinjauan sistematis.

Pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui beberapa basis data akademik bereputasi, meliputi Google Scholar, Portal Garuda (Garba Rujukan Digital) untuk jurnal nasional, Scopus untuk jurnal internasional, serta Science Direct. Kriteria inklusi yang diterapkan meliputi: (1) artikel diterbitkan dalam rentang waktu 2021 hingga 2025; (2) artikel telah melalui proses peer review dan diterbitkan dalam jurnal terindeks Sinta (untuk jurnal nasional) atau Scopus (untuk jurnal internasional); (3) artikel membahas topik yang relevan dengan kode etika, etika keuangan, tata kelola perusahaan, kecurangan keuangan, atau kualitas pelaporan keuangan; serta (4) artikel tersedia dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kriteria eksklusi meliputi artikel berbentuk editorial, laporan konferensi yang tidak melalui proses review ketat, dan artikel yang tidak memiliki fokus pada aspek keuangan atau akuntansi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis konten kualitatif (*qualitative content analysis*) terhadap literatur yang telah dipilih melalui proses seleksi sistematis. Proses analisis dijalankan dalam empat tahap yang berurutan: pertama, *open coding* untuk mengidentifikasi tema-tema dan kategori yang muncul dari literatur; kedua, *axial coding* untuk mengidentifikasi hubungan antar kategori; ketiga, *selective coding* untuk memilih kategori inti yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian; dan keempat, sintesis untuk menghasilkan proposisi teoritis yang menjawab tujuan penelitian (Sugiyono, 2021). Validitas penelitian dijaga melalui proses triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai penelitian yang berbeda untuk mengidentifikasi pola dan konsistensi yang muncul,

serta melalui member checking dengan meminta umpan balik dari pakar di bidang etika bisnis dan akuntansi.

Variabel independen

dalam penelitian ini adalah **Budaya Etika Organisasi (X_1)**, yang mencerminkan sejauh mana nilai-nilai etis telah terinternalisasi dalam sistem, proses, dan perilaku organisasi secara keseluruhan. Variabel ini dioperasionalisasikan melalui beberapa indikator yang dapat diobservasi, yaitu:

a. keberadaan kode etika tertulis yang komprehensif dan diperbarui secara berkala
b. intensitas dan kualitas program pelatihan etika bagi karyawan
c. persepsi karyawan mengenai iklim etika organisasi yang diukur melalui survei
d. skor atau indeks GCG yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat independen. Pemilihan budaya etika organisasi sebagai variabel independen utama didasari oleh asumsi bahwa etika bukan sekadar dokumen formal, melainkan sebuah fenomena budaya yang mengakar dalam nilai-nilai, asumsi, dan perilaku anggota organisasi (Pratama et al., 2023).

Variabel Penelitian

Mengacu pada kerangka konseptual penelitian dan merujuk pada berbagai literatur yang dikaji, penelitian ini mengoperasionalisasikan variabel-variabel berikut sebagai basis analisis. Pemilihan variabel ini didasarkan pada relevansinya dengan topik penelitian serta ketersediaan indikator pengukuran yang telah tervalidasi dalam literatur terdahulu. Tabel 1 menyajikan ringkasan variabel independen dan dependen beserta indikator pengukurannya.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Jenis Variabel	Variabel	Indikator / Proksi Pengukuran	Referensi
Variabel Independen (X)	Budaya Etika Organisasi (X_1)	Keberadaan kode etika tertulis, frekuensi pelatihan etika, persepsi karyawan terhadap iklim etika organisasi, indeks GCG	Pratama et al. (2023); Sanjaya & Kusumastuti (2023)
Variabel Dependen (Y)	Kualitas Pelaporan Keuangan (Y_1)	Tingkat akrual diskresioner (proksi manajemen laba), opini auditor, indeks pengungkapan sukarela, ketepatan waktu pelaporan	Astuti & Permana (2021); Rahayu & Prastiti (2022)
	Pencegahan Kecurangan Keuangan (Y_2)	Frekuensi insiden kecurangan, efektivitas sistem pengendalian internal (skor COSO), keberadaan dan utilisasi whistleblowing system	Susanto & Marlina (2023); Maharani & Kusuma (2024)
	Kepercayaan Pemangku Kepentingan (Y_3)	Skor kepercayaan investor, biaya modal (cost of equity capital), credit rating, volume perdagangan saham, reaksi pasar terhadap pengumuman laba	Rahmawati & Setiawan (2024); Hidayat & Nurhayati (2022)

Sumber: Sintesis dari berbagai literatur, 2025

Variabel dependen

Kualitas Pelaporan Keuangan (Y_1),

mengukur sejauh mana laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Indikator yang digunakan mencakup: tingkat akrual diskresioner sebagai proksi untuk mengukur derajat manajemen laba; opini auditor independen sebagai cerminan kewajarab penyajian laporan keuangan; indeks pengungkapan sukarela yang mengukur kelengkapan informasi yang diungkapkan melebihi persyaratan minimum; serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada otoritas dan publik (Astuti & Permana, 2021; Rahayu & Prastiti, 2022). Variabel ini dipilih karena kualitas pelaporan keuangan merupakan salah satu output terpenting dari pengelolaan keuangan yang berbasis etika, dan memiliki dampak langsung terhadap efisiensi pasar modal dan pengambilan keputusan investasi.

Pencegahan Kecurangan Keuangan (Y_2)

mengukur efektivitas sistem dan budaya organisasi dalam mencegah dan mendeteksi berbagai bentuk kecurangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, termasuk manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Indikator yang digunakan meliputi: frekuensi insiden kecurangan yang terdeteksi dan dilaporkan; efektivitas sistem pengendalian internal yang diukur menggunakan kerangka COSO; serta keberadaan dan tingkat utilisasi whistleblowing system sebagai mekanisme deteksi dini kecurangan (Susanto & Marlina, 2023; Maharani & Kusuma, 2024). Variabel ini penting karena kecurangan keuangan merupakan salah satu konsekuensi paling serius dari lemahnya budaya etika dalam pengelolaan keuangan.

Kepercayaan Pemangku Kepentingan (Y_3)

Mengukur tingkat kepercayaan berbagai pihak terutama investor, kreditur, dan mitra bisnis terhadap perusahaan sebagai hasil dari pengelolaan keuangan yang beretika. Indikator yang digunakan mencakup: skor kepercayaan investor yang diukur melalui survei; biaya modal (*cost of equity capital*) sebagai proksi pasar terhadap risiko yang dirasakan investor; peringkat kredit (*credit rating*) yang diberikan oleh lembaga pemeringkat independen; serta reaksi pasar terhadap pengumuman laba yang mencerminkan kredibilitas informasi keuangan perusahaan (Rahmawati & Setiawan, 2024). Kepercayaan pemangku kepentingan merupakan aset tidak berwujud yang bernilai tinggi dan sangat ditentukan oleh konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan keuangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Kode Etika dalam Pengelolaan Keuangan

Hasil sintesis dari 15 literatur yang dikaji mengidentifikasi lima prinsip utama kode etika yang memiliki relevansi langsung dan konsisten dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Kelima prinsip ini transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mengait dan membentuk kerangka etika yang komprehensif. Absennya salah satu prinsip dapat melemahkan keseluruhan sistem etika dan membuka celah bagi berbagai bentuk penyimpangan (Purnomo & Wijaya, 2024). Tabel 2 menyajikan ringkasan prinsip-prinsip tersebut beserta implementasinya dalam konteks keuangan.

Tabel 2. Prinsip Kode Etika dan Implementasinya dalam Pengelolaan Keuangan

No.	Prinsip Etika	Implementasi dalam Keuangan Perusahaan	Literatur Pendukung
1	Transparansi	Pengungkapan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu	Rahmawati & Setiawan (2024); Hidayat & Nurhayati (2022)

No.	Prinsip Etika	Implementasi dalam Keuangan Perusahaan	Literatur Pendukung
		kepada seluruh pemangku kepentingan; penyusunan CALK yang komprehensif; laporan tahunan yang mengungkapkan risiko secara jujur	
2	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan aset perusahaan; audit internal dan eksternal yang efektif; pemisahan tugas yang jelas; dokumentasi keputusan keuangan yang memadai	Wibowo & Kusuma (2022); Susanto & Marlina (2023)
3	Tanggung Jawab	Kepatuhan terhadap standar akuntansi (SAK/IFRS) dan regulasi OJK; pertimbangan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan finansial; pemenuhan kewajiban pajak dan pelaporan wajib	Kurniawan & Pratiwi (2021); Pratama et al. (2023)
4	Independensi	Kebebasan dari konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan keuangan; independensi auditor dari tekanan klien; komposisi dewan komisaris independen yang memadai; objektivitas dalam penilaian aset	Hartono et al. (2023); Sanjaya & Kusumastuti (2023)
5	Kewajaran	Perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh pemegang saham; distribusi keuntungan yang proporsional; kebijakan kompensasi yang transparan; penghindaran transaksi pihak berelasi yang tidak wajar	Purnomo & Wijaya (2024); Maharani & Kusuma (2024)

Sumber: Sintesis dari berbagai literatur, 2025

Transparansi merupakan prinsip yang paling mendasar dalam etika keuangan karena menjadi landasan bagi semua prinsip lainnya. Transparansi dalam pengelolaan keuangan diwujudkan melalui penyediaan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan yang berhak mendapatkan informasi tersebut. Penelitian Rahmawati dan Setiawan (2024) membuktikan secara empiris bahwa tingkat transparansi pelaporan keuangan berkorelasi positif dan signifikan dengan tingkat kepercayaan investor dan nilai perusahaan; setiap peningkatan satu satuan pada indeks transparansi dikaitkan dengan penurunan sebesar 23 basis poin pada biaya modal perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban etis, tetapi juga memiliki nilai ekonomis yang konkret bagi perusahaan.

Akuntabilitas menuntut manajemen untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan keuangan kepada pihak-pihak yang berhak. Implementasi akuntabilitas memerlukan sistem pelaporan yang robust, prosedur otorisasi bertingkat yang jelas, pemisahan tugas yang memadai, serta mekanisme audit yang independen dan kompeten. Tanpa akuntabilitas yang kuat, risiko penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan menjadi sangat tinggi. Wibowo dan Kusuma (2022) menekankan bahwa akuntabilitas dalam konteks profesi akuntan memiliki dimensi ganda: akuntabilitas kepada klien (menjaga kerahasiaan dan bertindak sesuai kepentingan klien) sekaligus akuntabilitas kepada publik (memastikan laporan keuangan yang diaudit dapat diandalkan oleh pengguna umum).

PEMBAHASAN

Pengaruh Budaya Etika terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Y_1)

Hasil sintesis literatur secara konsisten menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kekuatan budaya etika organisasi (X_1) dengan kualitas pelaporan keuangan (Y_1). Astuti dan Permana (2021) dalam penelitiannya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menemukan bahwa perusahaan dengan program etika yang komprehensif menunjukkan nilai akrual diskresioner yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan perusahaan tanpa program etika formal selisihnya mencapai 2,3% dari total aset, yang merupakan indikasi manajemen laba yang lebih rendah. Perbedaan ini bermakna secara statistik pada tingkat signifikansi 1%, mengindikasikan bahwa budaya etika yang kuat secara efektif membatasi insentif dan kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan.

Rahayu dan Prastiti (2022) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan indeks etika tinggi memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang lebih besar, rata-rata 34% lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan indeks etika rendah. Pengungkapan sukarela yang lebih luas ini mencakup informasi mengenai prospek bisnis, risiko operasional, kebijakan kompensasi eksekutif, dan dampak lingkungan-sosial perusahaan. Ketersediaan informasi yang lebih komprehensif ini membantu investor dalam membuat penilaian yang lebih akurat terhadap nilai dan risiko perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi pasar modal. Studi tersebut juga menemukan bahwa hubungan antara etika dan kualitas pengungkapan semakin kuat ketika perusahaan memiliki komite audit yang independen dan aktif, menunjukkan adanya efek sinergis antara mekanisme tata kelola formal dan komitmen etis informal.

Dimensi ketepatan waktu pelaporan juga menunjukkan pola yang serupa. Perusahaan dengan budaya etika yang kuat cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada OJK dan publik, mencerminkan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap hak pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang aktual (Hidayat & Nurhayati, 2022). Keterlambatan pelaporan, yang sering kali merupakan sinyal adanya masalah dalam laporan keuangan, jauh lebih jarang terjadi pada perusahaan dengan komitmen etis yang tinggi. Secara keseluruhan, bukti-bukti empiris yang tersedia secara konsisten mendukung proposisi bahwa budaya etika yang kuat merupakan salah satu determinan terpenting dari kualitas pelaporan keuangan, sebanding bahkan melampaui faktor-faktor teknis seperti ukuran perusahaan atau kompleksitas bisnis.

Pengaruh Budaya Etika terhadap Pencegahan Kecurangan Keuangan (Y_2)

Hubungan antara budaya etika (X_1) dan pencegahan kecurangan keuangan (Y_2) merupakan salah satu yang paling banyak diteliti dalam literatur etika bisnis, dan hasilnya secara konsisten menunjukkan dampak yang signifikan dan substantif. Susanto dan Marlina (2023) menemukan dalam studi mereka pada industri perbankan Indonesia bahwa bank-bank dengan program etika yang komprehensif dan sistem pengendalian internal berbasis nilai etis (sebagaimana diukur dengan skor komponen lingkungan pengendalian COSO) menunjukkan frekuensi insiden kecurangan 47% lebih rendah dibandingkan bank-bank yang mengandalkan pengendalian prosedural semata tanpa fondasi etika yang kuat. Perbedaan ini sangat bermakna mengingat industri perbankan merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap kecurangan keuangan.

Maharani dan Kusuma (2024) secara spesifik meneliti efektivitas whistleblowing system sebagai mekanisme pencegahan kecurangan yang berbasis etika. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki whistleblowing system yang berfungsi dengan baik ditandai dengan tingkat utilizasi yang tinggi, jaminan kerahasiaan pelapor, dan tindak lanjut yang konsisten terhadap setiap laporan mampu mendeteksi kecurangan rata-rata 14 bulan lebih awal dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki sistem tersebut. Lebih penting lagi, studi ini menemukan bahwa efektivitas whistleblowing system sangat bergantung pada persepsi karyawan mengenai iklim etika organisasi; ketika karyawan percaya bahwa manajemen puncak benar-benar berkomitmen terhadap nilai-nilai etis dan tidak akan membalas pelapor, mereka 3,2 kali lebih mungkin untuk menggunakan sistem tersebut dibandingkan ketika mereka meragukan komitmen tersebut.

Dimensi konflik kepentingan juga menjadi area penting dalam hubungan antara etika dan pencegahan kecurangan. Hartono et al. (2023) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki kebijakan pengelolaan konflik kepentingan yang jelas dan ditegakkan secara konsisten menunjukkan tingkat transaksi pihak berelasi yang tidak wajar (*related party transactions*) yang lebih rendah, yang merupakan salah satu bentuk kecurangan yang paling umum terjadi di perusahaan-perusahaan Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi kewajiban pengungkapan benturan kepentingan, mekanisme persetujuan independen untuk transaksi tertentu, dan sanksi yang jelas bagi pelanggaran. Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan kecurangan tidak hanya memerlukan sistem pengendalian yang ketat, tetapi juga budaya organisasi yang tidak mentolerir perilaku yang mementingkan diri sendiri di atas kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengaruh Budaya Etika terhadap Kepercayaan Pemangku Kepentingan (Y_3)

Kepercayaan pemangku kepentingan (Y_3) merupakan dampak jangka panjang yang paling strategis dari penerapan kode etika dalam pengelolaan keuangan. Rahmawati dan Setiawan (2024) dalam penelitian longitudinal mereka selama lima tahun pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI menemukan bahwa peningkatan konsistensi penerapan etika dalam pelaporan keuangan diukur melalui perubahan skor transparansi dan akuntabilitas dari tahun ke tahun berkorelasi positif dan signifikan dengan peningkatan kepercayaan investor, yang diproksikan melalui penurunan *cost of equity capital* dan peningkatan volume perdagangan saham. Rata-rata, perusahaan yang meningkatkan skor etikanya secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan biaya modal sebesar 1,7% dan peningkatan volume

perdagangan sebesar 23%, yang merupakan dampak ekonomis yang sangat signifikan.

Kepercayaan kreditur, yang diukur melalui peringkat kredit dan kondisi pinjaman yang diperoleh, juga menunjukkan korelasi yang kuat dengan budaya etika perusahaan. Perusahaan dengan reputasi etika yang baik dalam pengelolaan keuangan cenderung memperoleh peringkat kredit yang lebih tinggi dan akses terhadap kredit dengan suku bunga yang lebih rendah, mencerminkan persepsi risiko yang lebih rendah dari pihak kreditur (Wibowo & Kusuma, 2022). Hal ini menciptakan keunggulan kompetitif yang nyata bagi perusahaan beretika: biaya pendanaan yang lebih rendah berarti margin keuntungan yang lebih tinggi atau kemampuan untuk menawarkan produk dan jasa dengan harga yang lebih kompetitif, atau keduanya sekaligus. Dengan demikian, investasi dalam pembangunan budaya etika yang kuat memberikan imbal hasil finansial yang nyata dan terukur.

Reaksi pasar terhadap pengumuman laba juga memberikan cerminan yang menarik tentang kepercayaan pemangku kepentingan. Astuti dan Permana (2021) menemukan bahwa perusahaan dengan reputasi etika yang tinggi menunjukkan koefisien respon laba (*Earnings Response Coefficient* / ERC) yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan reputasi etika yang rendah. ERC yang tinggi berarti bahwa pasar memberikan bobot yang lebih besar pada informasi laba yang diumumkan, yang mencerminkan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap kualitas dan keandalan informasi tersebut. Sebaliknya, ERC yang rendah pada perusahaan dengan reputasi etika yang lemah menunjukkan bahwa investor cenderung mendiskon atau mempertanyakan kualitas laba yang dilaporkan, yang pada akhirnya menekan valuasi pasar perusahaan tersebut.

Tantangan Implementasi dan Rekomendasi

Meskipun manfaat penerapan kode etika dalam pengelolaan keuangan telah didokumentasikan secara ekstensif dalam berbagai penelitian, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Tantangan pertama dan paling fundamental adalah tekanan untuk memenuhi target kinerja jangka pendek yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip etis. Manajemen yang menghadapi tekanan dari pemegang saham untuk memenuhi ekspektasi laba per kuartal mungkin tergoda untuk melakukan manajemen laba agresif atau menunda pengungkapan informasi negatif, meski tindakan tersebut melanggar prinsip transparansi dan kejujuran (Pratama et al., 2023). Mengatasi tantangan ini memerlukan perubahan orientasi dari pemegang saham dan analis keuangan untuk lebih mengapresiasi kinerja jangka panjang yang berkelanjutan daripada pencapaian target kuartalan yang mungkin dicapai dengan mengorbankan integritas.

Tantangan kedua adalah resistensi perubahan budaya. Mengintegrasikan nilai-nilai etis ke dalam budaya organisasi yang telah terbentuk adalah proses yang memerlukan waktu bertahun-tahun dan komitmen yang konsisten dari seluruh level manajemen. Sanjaya dan Kusumastuti (2023) menemukan bahwa program etika yang baru diimplementasikan rata-rata memerlukan waktu tiga hingga lima tahun untuk menunjukkan dampak yang terukur terhadap perilaku karyawan dan kualitas pengelolaan keuangan. Ketidaksabaran dalam mengharapkan hasil instan dari program etika seringkali menjadi penyebab kegagalan implementasi; manajemen menyimpulkan bahwa program tidak efektif dan menghentikannya sebelum dampaknya sempat terlihat. Rekomendasi untuk mengatasi tantangan ini adalah menetapkan indikator keberhasilan yang realistis dan bertahap, serta membangun mekanisme pengukuran

yang dapat mendeteksi perubahan budaya yang bersifat incremental.

Berdasarkan sintesis dari seluruh literatur yang dikaji, terdapat tiga rekomendasi utama untuk memperkuat penerapan kode etika dalam pengelolaan keuangan. **Pertama**, perusahaan perlu mengembangkan kode etika yang spesifik untuk fungsi keuangan, yang tidak hanya mengulang prinsip-prinsip umum etika bisnis, tetapi secara eksplisit membahas situasi-situasi dilema etis yang spesifik bagi personel keuangan seperti bagaimana menangani tekanan dari atasan untuk memanipulasi angka, atau bagaimana mengungkapkan informasi negatif yang mungkin berdampak pada harga saham (Dewi & Rahayu, 2022). **Kedua**, manajemen puncak harus mendemonstrasikan komitmen etis melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan retoris; *tone at the top* yang autentik dan konsisten merupakan prasyarat paling penting bagi keberhasilan program etika. **Ketiga**, perusahaan perlu mengintegrasikan penilaian etika ke dalam sistem evaluasi kinerja karyawan, sehingga perilaku etis mendapatkan penghargaan dan pelanggaran etika mendapatkan konsekuensi nyata, menciptakan insentif struktural yang mendukung perilaku etis dalam jangka panjang (Susanto & Marlina, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji secara komprehensif penerapan kode etika dalam pengelolaan keuangan perusahaan melalui pendekatan tinjauan literatur sistematis. Berdasarkan sintesis dari 15 penelitian yang relevan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, budaya etika organisasi sebagai variabel independen utama terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketiga variabel dependen yang diteliti: kualitas pelaporan keuangan (Y_1), efektivitas pencegahan kecurangan keuangan (Y_2), dan kepercayaan pemangku kepentingan (Y_3). Pengaruh ini bersifat komprehensif dan mencakup berbagai dimensi pengelolaan keuangan, dari penyusunan laporan keuangan hingga pengelolaan risiko dan komunikasi dengan investor.

Kedua, implementasi kode etika yang efektif dalam pengelolaan keuangan memerlukan pendekatan multi-dimensi yang mencakup pengembangan kode etika tertulis yang komprehensif dan kontekstual, komitmen yang genuine dari manajemen puncak (*tone at the top*), penguatan mekanisme pengendalian internal berbasis nilai etis, pengembangan whistleblowing system yang efektif, serta pembangunan budaya etika yang berkelanjutan melalui pelatihan dan sistem insentif yang tepat. Tidak ada satu elemen tunggal yang cukup; efektivitas program etika bergantung pada sinergi antara seluruh elemen tersebut.

REFERENSI

Astuti, D., & Permana, A. (2021). Pengaruh penerapan kode etik profesi akuntan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 145–162. https://doi.org/10.21002/jaki.2021.08

Dewi, R. K., & Rahayu, S. (2022). Etika bisnis dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan: Studi pada perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 23–40. https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.37524

Hartono, B., Setiawan, A., & Permana, R. (2023). Agency theory dan implikasinya terhadap pengendalian internal: Tinjauan sistematis. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 55–74. https://doi.org/10.24914/jeb.v26i1.5892

Hidayat, T., & Nurhayati, M. (2022). Kualitas audit dan kualitas laporan keuangan: Peran mediasi independensi auditor. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 14(2), 112–128. https://doi.org/10.15294/jda.v14i2.43210

Kurniawan, R., & Pratiwi, A. (2021). Manajemen keuangan berbasis etika: Konsep dan

implementasi di perusahaan Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(3), 201–220. https://doi.org/10.38043/jmb.v18i3.2831

Maharani, D., & Kusuma, H. (2024). Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) dan efektivitasnya dalam pencegahan kecurangan keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 78–95. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2024.15.1.05

Nugroho, P., & Santoso, B. (2021). Penerapan prinsip etika dalam manajemen keuangan perusahaan BUMN: Analisis komparatif. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(2), 189–207. https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i2.5681

Pratama, A., Wulandari, R., & Handayani, S. (2023). Kode etik, budaya organisasi, dan pencegahan kecurangan: Studi empiris pada perusahaan publik. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 23(2), 133–150. https://doi.org/10.20961/jab.v23i2.65421

Purnomo, R., & Wijaya, T. (2024). Good corporate governance dan kode etika: Sinergi untuk tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(1), 45–62. https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i1.723

Rahayu, N., & Prastiti, S. D. (2022). Pengaruh komitmen etis terhadap manajemen laba: Bukti dari perusahaan manufaktur Indonesia. *Indonesian Accounting Review*, 12(2), 165–182. https://doi.org/10.14414/tiar.v12i2.2621

Rahmawati, F., & Setiawan, D. (2024). Transparansi pelaporan keuangan, kepercayaan investor, dan nilai perusahaan: Peran moderasi tata kelola perusahaan. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 88–105. https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.26471

Sanjaya, I., & Kusumastuti, R. (2023). Kode etik perusahaan dan kualitas tata kelola: Analisis pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 24(2), 98–115. https://doi.org/10.24198/jbm.v24i2.914

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi 3). Alfabeta.

Supriyanto, A., & Mulyadi, M. (2021). Etika bisnis internasional dan tantangan penerapannya bagi perusahaan multinasional asal Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 10(3), 245–265. https://doi.org/10.26418/jebik.v10i3.47921

Susanto, Y., & Marlina, L. (2023). Pengendalian internal, etika organisasi, dan pencegahan kecurangan keuangan: Studi pada perusahaan perbankan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 34–52. https://doi.org/10.33508/jako.v15i1.4025

Wibowo, E., & Kusuma, B. (2022). Kode etik profesi akuntan publik dan implikasinya terhadap kualitas audit: Kajian berbasis IESBA Code of Ethics. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(2), 78–95. https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss2.art1